



Reformasi Sistem Pangan Nasional

untuk Menghadapi Krisis Global

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: **Reformasi Sistem Pangan Nasional untuk
Menghadapi Krisis Global**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

11 Maret 2026

REFORMASI SISTEM PANGAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Pendahuluan

Reformasi sistem pangan nasional bukan lagi pilihan kebijakan yang dapat ditunda, melainkan kebutuhan strategis yang semakin mendesak. Dunia sedang bergerak dalam lanskap yang ditandai oleh inflasi pangan, perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan logistik, dan pelemahan daya beli rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, pangan tidak dapat lagi dilihat sekadar sebagai urusan produksi pertanian, tetapi harus dipahami sebagai sistem yang menghubungkan lahan, air, energi, transportasi, perdagangan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola negara. World Bank menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup empat dimensi, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Karena itu, reformasi pangan tidak cukup hanya menambah panen; reformasi harus memastikan bahwa pangan tersedia, terjangkau, bergizi, dan tetap aman di tengah guncangan. ([World Bank](#))

Urgensi reformasi itu tampak jelas dalam data global mutakhir. SOFI 2025 melaporkan bahwa pada 2024 sekitar 673 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan, atau sekitar 8,2 persen populasi global. Pada saat yang sama, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat, dan tingginya inflasi pangan terus

melemahkan daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Di sisi lain, *Global Report on Food Crises 2025* mencatat bahwa lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut pada 2024, meningkat 13,7 juta orang dibanding 2023, terutama akibat konflik, guncangan ekonomi, cuaca ekstrem, dan perpindahan paksa. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa problem pangan global kini bersifat sistemik, saling terkait, dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan sektoral yang sempit. ([FAOHome](#))

Dalam konteks Indonesia, reformasi sistem pangan menjadi sangat penting karena negara ini menghadapi kombinasi paradoks yang khas. Di satu sisi, BPS melaporkan bahwa pada 2025 produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling dan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibanding 2024. Di sisi lain, inflasi tahunan Februari 2026 mencapai 4,76 persen, dan kemiskinan pada September 2025 masih sebesar 8,25 persen, dengan kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Artinya, Indonesia menunjukkan kemajuan di sisi produksi, tetapi tantangan akses, distribusi, stabilitas harga, dan kerentanan rumah tangga masih kuat. Reformasi sistem pangan karena itu harus menjawab pertanyaan yang lebih besar: bagaimana mengubah peningkatan produksi menjadi keamanan pangan nyata di tingkat rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berargumen bahwa reformasi sistem pangan nasional harus bergerak dari paradigma "komoditas dan panen" menuju paradigma "sistem dan resiliensi". Dalam paradigma lama, keberhasilan pangan sering diukur dari luas tanam, tonase produksi, dan stok komoditas utama. Dalam paradigma baru, yang harus diukur adalah kemampuan sistem pangan menjaga pasokan, menekan kehilangan hasil, memperlancar distribusi, menjaga keterjangkauan diet sehat, melindungi petani dan konsumen rentan, serta bertahan ketika krisis global datang secara bersamaan. Atas dasar itu, tulisan ini membahas mengapa

reformasi diperlukan, apa saja titik lemah sistem pangan Indonesia, dan reformasi apa yang perlu diprioritaskan agar Indonesia lebih tangguh menghadapi krisis global. ([World Bank](#))

Sistem Pangan Nasional dalam Bayang-Bayang Krisis Global

Krisis global telah mengubah cara kita harus membaca pangan. Dalam masa yang lebih stabil, masalah pangan sering dianggap sebagai persoalan produksi domestik dan perdagangan biasa. Namun laporan *Global Economic Prospects* Bank Dunia menunjukkan bahwa ekonomi global kini dibayangi oleh ketegangan perdagangan, memburuknya sentimen pasar, tekanan fiskal, dan ketidakpastian kebijakan yang tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, pangan menjadi sektor yang sangat rentan karena biaya pupuk, energi, transportasi, suku bunga, nilai tukar, dan arus perdagangan semuanya memengaruhi biaya produksi dan harga pangan secara langsung. Dengan kata lain, krisis global kini menembus sistem pangan melalui banyak pintu sekaligus. ([The World Bank](#))

Inflasi pangan merupakan salah satu jalur transmisi paling nyata dari krisis global ke kehidupan rumah tangga. *Food Security Update* Bank Dunia mencatat bahwa pada akhir 2025 inflasi pangan riil masih melampaui inflasi umum di 65 persen dari 161 negara yang datanya tersedia. Bank Dunia juga mencatat bahwa meskipun beberapa harga komoditas global seperti beras dan gandum menurun dibanding puncak krisis sebelumnya, tekanan biaya tetap tinggi di banyak negara karena input, distribusi, dan struktur pasar domestik belum pulih sepenuhnya. FAO dalam SOFI 2025 menambahkan bahwa inflasi harga pangan yang tinggi secara langsung terkait dengan meningkatnya kerawanan pangan dan malnutrisi anak, terutama di kalangan berpendapatan rendah. Ini berarti guncangan harga pangan tidak berhenti pada statistik inflasi; ia segera berubah menjadi persoalan gizi, kemiskinan, dan stabilitas sosial. ([The World Bank](#))

Perubahan iklim memperberat problem tersebut. IPCC menegaskan bahwa perubahan iklim telah mengurangi ketahanan pangan dan mengganggu keamanan air, sementara WMO menyatakan bahwa 2025 termasuk salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat. Kenaikan suhu, perubahan pola hujan, kekeringan, banjir, dan kejadian cuaca ekstrem berarti produksi pangan modern beroperasi di dalam lingkungan yang makin tidak stabil. Bagi negara agraris dan kepulauan seperti Indonesia, risiko ini berlipat: cuaca dapat menurunkan panen, merusak jaringan distribusi, dan pada akhirnya memicu gejolak harga secara bersamaan. Ini sebabnya reformasi sistem pangan tidak dapat dilepaskan dari agenda adaptasi iklim. ([Open Knowledge FAO](#))

Konflik dan fragmentasi perdagangan juga memperdalam kerentanan. Laporan WFP tentang *Global Report on Food Crises 2025* menunjukkan bahwa konflik tetap menjadi pendorong utama kelaparan akut. Sementara itu, *Food Security Update* Bank Dunia menegaskan bahwa perdagangan berpengaruh pada harga pangan dan keterjangkauan diet sehat, serta bahwa keterbukaan perdagangan pada umumnya dapat menurunkan harga pangan, walau manfaatnya bisa tidak merata. Pelajaran untuk Indonesia cukup jelas: ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas ketergantungan buta pada pasar global, tetapi juga tidak bisa dibangun melalui penutupan total. Sistem pangan nasional harus cukup kuat secara domestik, tetapi tetap memiliki jaringan perdagangan yang cerdas, terdiversifikasi, dan adaptif. ([World Food Programme](#))

Mengapa Sistem Pangan Indonesia Perlu Direformasi

Indonesia bukan negara yang lemah dalam produksi pangan, tetapi sistem pangannya masih menunjukkan sejumlah ketidakseimbangan. Dari sisi produksi, capaian 2025 cukup mengesankan. BPS menunjukkan adanya kenaikan nyata pada luas panen dan produksi beras nasional. Bapanas juga menyatakan bahwa stok awal beras nasional pada 2026

meningkat tajam dibanding dua tahun sebelumnya, termasuk CBP Bulog sekitar 3,248 juta ton pada awal 2026. Data ini memberi sinyal bahwa Indonesia tidak sedang menghadapi krisis total pasokan. Namun justru di sinilah letak paradoksnya: ketika pasokan agregat membaik, masalah harga, distribusi, dan keterjangkauan tetap tidak otomatis selesai. ([Badan Pangan Nasional](#))

Reformasi dibutuhkan karena sistem pangan Indonesia masih terlalu sering dibaca dari sudut pandang komoditas utama, terutama beras, dan dari indikator tahunan seperti panen serta stok. Pendekatan ini bermanfaat, tetapi tidak cukup. Ketahanan pangan rumah tangga ditentukan oleh apa yang terjadi setiap minggu di pasar, bukan hanya oleh apa yang terjadi sekali setahun di statistik panen. Ketika distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit terganggu, atau ketika komoditas hortikultura dan protein hewani melonjak, rumah tangga merasakan tekanan langsung meskipun stok beras nasional aman. Maka, reformasi sistem pangan berarti memperbaiki cara negara membaca pangan: dari indikator tunggal menuju rantai sistem secara utuh. ([World Bank](#))

Reformasi juga diperlukan karena sistem pangan Indonesia masih menghadapi dualisme antara ketahanan komoditas dan kualitas konsumsi. Data World Bank tentang *Food Prices for Nutrition* menekankan bahwa persoalan utama banyak negara bukan sekadar ketersediaan kalori, tetapi keterjangkauan diet sehat. Secara global, kelompok pangan paling mahal dalam diet sehat adalah pangan hewani, disusul sayuran dan buah. Ini sangat relevan untuk Indonesia, sebab penurunan stunting menjadi 19,8 persen pada 2024 menunjukkan kemajuan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kualitas diet rumah tangga masih merupakan pekerjaan besar. Bila reformasi pangan hanya menekankan pasokan beras murah tanpa memperluas akses terhadap protein, buah, sayur, dan pangan lokal bergizi, maka pembangunan pangan akan tertinggal dari pembangunan manusia. ([World Bank](#))

Selain itu, reformasi dibutuhkan karena sistem pangan Indonesia harus mampu bekerja dalam dunia yang makin volatil. Bappenas dalam berbagai pernyataannya mengenai RPJMN 2025–2029 menekankan penguatan strategi ketahanan pangan, transformasi pangan nasional, dan pengembangan sistem pangan yang bernutrisi, inklusif, berkeadilan, resilien, dan berkelanjutan. Penekanan itu penting karena menunjukkan bahwa pemerintah sendiri mulai memandang pangan sebagai agenda transformasi, bukan sekadar agenda rutin. Dengan kata lain, reformasi sistem pangan bukan gagasan akademik semata; ia telah masuk ke arus utama perencanaan pembangunan nasional. ([Bappenas](#))

Titik Lemah Sistem Pangan Nasional

Titik lemah pertama ada pada orientasi yang masih cenderung menekankan output dibanding efisiensi sistem. Produksi yang tinggi penting, tetapi apabila kehilangan hasil saat panen dan pascapanen tetap besar, biaya logistik tinggi, atau integrasi pasar antarwilayah lemah, maka sebagian manfaat produksi akan hilang sebelum sampai ke konsumen. Bappenas secara eksplisit menekankan perlunya memetakan sektor perberasan dari hulu ke hilir. Frasa ini mengandung pengakuan bahwa problem pangan Indonesia tidak berhenti di sawah. Ia berlanjut ke penggilingan, penyimpanan, transportasi, distributor, pasar, hingga meja makan. Reformasi diperlukan justru karena kelemahan-kelemahan rantai ini masih kerap memutus transmisi manfaat produksi ke masyarakat luas. ([Bappenas](#))

Titik lemah kedua ada pada distribusi dan disparitas wilayah. Bank Indonesia dalam GPIPS menempatkan penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional sebagai salah satu fokus utama pengendalian inflasi pangan. Ini menunjukkan bahwa masalah distribusi cukup serius sehingga perlu ditempatkan di jantung strategi stabilisasi. Dalam negara kepulauan, biaya transportasi, kualitas pelabuhan, gudang, *cold chain*, dan arus informasi stok sangat menentukan harga akhir. Jika

bagian ini lemah, maka daerah non-sentra produksi akan tetap menghadapi harga tinggi meskipun secara nasional pasokan terlihat cukup. Distribusi karena itu bukan soal teknis belaka, tetapi inti dari keadilan akses pangan. ([Badan Pangan Nasional](#))

Titik lemah ketiga adalah keterbatasan kemampuan sistem pangan untuk sekaligus melindungi produsen dan konsumen. Petani memerlukan harga yang layak dan kepastian serap. Konsumen memerlukan harga terjangkau. Negara memerlukan inflasi rendah. Ketiga tujuan ini sering kali tidak bergerak searah. Bila harga ditekan terlalu rendah untuk kepentingan konsumen, produsen bisa dirugikan. Bila harga dibiarkan tinggi untuk memberi insentif produsen, konsumen miskin tertekan. Dalam praktiknya, Indonesia mencoba menengahi ketegangan ini melalui cadangan pemerintah, SPHP, bantuan pangan, dan penguatan penyerapan domestik. Namun selama efisiensi sistem belum membaik, negara akan terus berada dalam posisi menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang mudah berbenturan. ([Badan Pangan Nasional](#))

Titik lemah keempat adalah masih rapuhnya sebagian kelompok produsen pangan. BPS menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan pada September 2025. Ini berarti kelompok produsen pangan nasional, yang sebagian besar tinggal di pedesaan, masih menghadapi kerentanan pendapatan yang besar. Sistem pangan yang sehat tidak bisa bertumpu pada produsen yang terus-menerus rentan. Reformasi sistem pangan harus memastikan bahwa petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan skala kecil memperoleh akses lebih baik ke pembiayaan, teknologi, offtaker, dan perlindungan risiko. Tanpa itu, ketahanan pangan nasional akan dibangun di atas basis sosial-ekonomi yang rapuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Titik lemah kelima adalah hubungan yang belum cukup kuat antara kebijakan pangan dan kebijakan gizi. Penurunan stunting adalah kabar

baik, tetapi ia juga menunjukkan bahwa problem gizi belum selesai. Sistem pangan yang terlalu terkunci pada satu komoditas pokok berisiko menghasilkan rasa aman semu: stok aman, tetapi diet tidak sehat; panen naik, tetapi mutu konsumsi tetap rendah. Karena itu, reformasi sistem pangan harus memasukkan logika gizi di dalam desainnya, bukan hanya di dalam program kesehatan. Ini sejalan dengan penekanan Bappenas pada sistem pangan yang bernutrisi dan dengan data World Bank tentang mahalunya komponen diet sehat, khususnya pangan hewani, buah, dan sayuran. ([Ministry of Health Republic of Indonesia](#))

Arah Reformasi: Dari Komoditas ke Sistem

Reformasi pertama yang paling mendasar adalah mengubah orientasi kebijakan dari komoditas menuju sistem pangan. Dalam pendekatan komoditas, keberhasilan diukur terutama dari tonase produksi, luas panen, dan stok. Dalam pendekatan sistem, keberhasilan diukur dari kemampuan seluruh rantai pangan menghasilkan empat hal sekaligus: pasokan yang cukup, distribusi yang efisien, harga yang stabil, dan diet yang lebih sehat. Ini bukan perubahan semantik, melainkan perubahan logika kebijakan. Bila fokusnya sistem, maka kementerian pertanian tidak dapat bekerja sendiri; pangan harus menjadi urusan terintegrasi antara pertanian, perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum, kesehatan, keuangan, dan pemerintah daerah. Arah ini sejalan dengan agenda transformasi pangan yang terus diangkat Bappenas dalam RPJMN dan kerja samanya dengan IFPRI maupun FAO. ([Bappenas](#))

Reformasi kedua adalah memperkuat produksi yang tangguh terhadap iklim, bukan sekadar meningkatkan output tahunan. Krisis global membuat pola cuaca makin sulit diprediksi, dan WMO serta IPCC telah menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan ancaman hipotetis. Maka, reformasi produksi harus mencakup benih tahan cekaman, efisiensi irigasi, pengelolaan lahan yang lebih baik, perlindungan pascapanen, dan sistem informasi agroklimat yang lebih responsif. Produksi yang

besar tetapi mudah jatuh ketika terjadi anomali musim bukanlah dasar yang aman bagi ketahanan pangan. Produksi yang dibutuhkan adalah produksi yang lebih stabil dan lebih resilien. ([Open Knowledge FAO](#))

Reformasi ketiga adalah membangun logistik pangan nasional sebagai infrastruktur stabilitas. Selama ini logistik sering dilihat sebagai penopang perdagangan, padahal dalam pangan ia adalah penopang daya beli. Ketika jalan, pelabuhan, gudang, transportasi pendingin, dan informasi stok berjalan baik, disparitas harga bisa ditekan. BI melalui GPIPS sudah menggarisbawahi bahwa distribusi dan konektivitas regional merupakan bagian inti dari stabilisasi inflasi pangan. Itu berarti reformasi logistik pangan tidak boleh lagi dianggap sebagai proyek teknis biasa, melainkan sebagai proyek stabilitas nasional. Negara kepulauan memerlukan sistem logistik pangan yang mempersingkat jarak ekonomi antara produsen dan konsumen, bukan hanya jarak geografis. ([Badan Pangan Nasional](#))

Reformasi keempat adalah memperkuat cadangan pangan dan tata kelola stabilisasi harga. Cadangan publik penting bukan hanya karena menyediakan stok fisik, tetapi juga karena membentuk ekspektasi pasar. Ketika pelaku usaha dan rumah tangga yakin negara memiliki cadangan dan jalur intervensi yang kredibel, kepanikan lebih mudah diredam. Bapanas pada awal 2026 menegaskan besarnya stok CBP dan kemudian mengarahkan SPHP ke daerah non-sentra produksi serta wilayah yang tidak sedang panen raya. Ini langkah yang tepat, tetapi reformasi lebih lanjut diperlukan agar cadangan, distribusi, data stok, dan keputusan intervensi semakin terintegrasi. Harga yang stabil tidak lahir dari operasi pasar sesaat, melainkan dari tata kelola stok yang cerdas. ([Badan Pangan Nasional](#))

Reformasi kelima adalah menjadikan keterjangkauan diet sehat sebagai tujuan kebijakan, bukan hanya keterjangkauan kalori. World Bank menegaskan bahwa komponen diet sehat yang paling mahal secara

global adalah pangan hewani, sayuran, dan buah. Ini berarti banyak rumah tangga dapat tetap makan, tetapi belum tentu makan dengan sehat. Di Indonesia, pelajaran ini penting sekali. Reformasi sistem pangan yang hanya mengejar stabilitas beras akan kurang memadai bila akses terhadap telur, ikan, daging, susu, sayur, dan buah tidak membaik. Sistem pangan yang direformasi harus memberi insentif pada diversifikasi produksi, pengembangan pangan lokal, distribusi hortikultura yang lebih efisien, dan integrasi dengan agenda gizi. Dengan cara itu, kebijakan pangan tidak hanya mencegah kelaparan, tetapi juga membangun kualitas SDM. ([World Bank](#))

Reformasi keenam adalah menjadikan perlindungan sosial sebagai bagian permanen dari desain sistem pangan. Ketika terjadi inflasi pangan atau bencana, rumah tangga rentan tidak memiliki waktu menunggu perbaikan pasar. Mereka memerlukan bantuan cepat agar tidak jatuh ke strategi bertahan yang destruktif, seperti mengurangi makan, menurunkan kualitas diet, atau menjual aset produktif. Karena itu, bantuan pangan, intervensi gizi, dan dukungan sosial harus dipandang sebagai *automatic stabilizer*. Pengalaman Indonesia dengan bantuan pangan beras dan operasi stabilisasi menunjukkan bahwa negara sudah bergerak ke arah ini, tetapi reformasi sistem pangan menuntut agar mekanisme perlindungan sosial makin presisi, terintegrasi dengan data, dan siap bekerja ketika krisis datang. ([Badan Pangan Nasional](#))

Reformasi ketujuh adalah memperkuat data, koordinasi, dan tata kelola. Sistem pangan yang kompleks tidak bisa diatur dengan informasi parsial. Negara membutuhkan data produksi, stok, harga, distribusi, cuaca, dan kerentanan sosial yang saling terhubung. Salah satu kekuatan GPIPS adalah penekanannya pada penguatan manajemen risiko dan koordinasi pusat-daerah. Namun reformasi yang lebih besar tetap diperlukan agar data pangan tidak terpecah antarinstansi, keputusan intervensi tidak terlambat, dan respons kebijakan lebih antisipatif daripada reaktif. Dalam dunia yang sangat tidak pasti, kualitas tata kelola sering kali menjadi

pembeda utama antara negara yang tahan krisis dan negara yang mudah terguncang. ([Badan Pangan Nasional](#))

Reformasi Kelembagaan dan Pembiayaan

Reformasi sistem pangan tidak akan berhasil tanpa perubahan kelembagaan. Pertama, perlu ada penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pangan tidak bisa diurus sendiri-sendiri karena satu masalah kecil di hulu dapat menjalar ke hilir dengan cepat. Kedua, peran kelembagaan ekonomi seperti koperasi, BUMDes, dan offtaker perlu diperkuat agar produsen kecil tidak selalu berada dalam posisi tawar yang lemah. Bappenas pada akhir 2024 menekankan bahwa transformasi pangan juga difokuskan pada pengembangan koperasi dan UMKM sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Arah ini penting sebab reformasi pangan tidak cukup hanya dengan negara yang lebih aktif; ia juga membutuhkan pelaku ekonomi lokal yang lebih kuat. ([Bappenas](#))

Aspek pembiayaan juga tidak bisa diabaikan. Petani, peternak, dan pelaku usaha pangan skala kecil sering menghadapi hambatan akses modal, sementara reformasi sistem pangan justru menuntut investasi baru dalam benih, alat, gudang, pendingin, transportasi, dan digitalisasi. Karena itu, reformasi pangan harus didukung oleh skema pembiayaan yang lebih adaptif dan terjangkau. Kerja sama Bappenas dengan BRI untuk memperkuat ekosistem perberasan dari hulu hingga hilir memberi sinyal bahwa pemerintah mulai melihat pembiayaan sebagai bagian dari reformasi sistem, bukan sekadar fasilitas tambahan. Ini langkah yang penting, sebab tanpa modal, transformasi di tingkat produsen tidak akan bergerak cepat. ([Bappenas](#))

Peran Regionalisasi dan Pangan Lokal

Salah satu arah reformasi yang patut diperhatikan adalah regionalisasi sistem pangan. Gagasan ini muncul dalam berbagai diskusi transformasi

pangan Indonesia, termasuk materi yang dikaitkan dengan agenda RPJPN/RPJMN, yang menekankan sistem pangan berbasis ekoregion, keanekaragaman hayati, dan kearifan lokal. Gagasannya sederhana tetapi penting: Indonesia terlalu beragam untuk dikelola dengan satu pola pangan yang seragam. Reformasi sistem pangan nasional akan lebih kuat bila ia memberi ruang lebih besar pada pangan lokal, keunggulan wilayah, dan ekologi setempat. Ini bukan berarti meninggalkan komoditas strategis nasional, tetapi menambah kedalaman dan elastisitas sistem pangan. Ketika satu komoditas terganggu, sistem yang lebih terdiversifikasi akan lebih tahan.

(indef.or.id)

Pangan lokal juga penting dari sisi gizi, ekonomi daerah, dan resiliensi. Ketika daerah mengembangkan pangan yang sesuai dengan agroekologi setempat, biaya adaptasi bisa lebih rendah dan ketergantungan pada distribusi jarak jauh bisa berkurang. Di saat yang sama, nilai tambah ekonomi lokal meningkat. Maka, reformasi sistem pangan nasional sebaiknya tidak dibaca sebagai sentralisasi yang makin kaku, melainkan sebagai orkestrasi nasional yang lebih cerdas: ada kerangka pusat yang kuat, tetapi dengan ruang wilayah yang lebih besar untuk mengembangkan solusi pangan yang relevan bagi konteks masing-masing. (Bappenas)

Penutup

Reformasi sistem pangan nasional untuk menghadapi krisis global pada intinya adalah reformasi cara negara memahami pangan. Selama pangan dibaca hanya sebagai urusan produksi, negara akan terus tertinggal dari kenyataan bahwa krisis pangan modern bekerja melalui banyak jalur: harga, logistik, gizi, iklim, perdagangan, dan daya beli. Data global dari FAO, WFP, dan World Bank menunjukkan bahwa dunia belum aman dari kerawanan pangan, bahkan ketika sebagian harga komoditas global sudah melandai. Data Indonesia menunjukkan hal yang sama: pasokan

nasional bisa membaik, tetapi tekanan harga, kemiskinan, dan kualitas diet tetap menuntut pembenahan yang lebih mendalam. ([FAOHome](#))

Karena itu, reformasi yang diperlukan bukanlah koreksi kecil, melainkan perubahan kerangka. Indonesia perlu bergerak dari logika komoditas ke logika sistem; dari kebijakan reaktif ke kebijakan antisipatif; dari fokus panen ke fokus resiliensi; dari sekadar stok ke keterjangkauan diet sehat; dari stabilisasi sesaat ke tata kelola yang terintegrasi. Produksi tetap penting, tetapi harus tangguh terhadap iklim. Distribusi harus dipandang sebagai infrastruktur stabilitas. Cadangan harus dikelola sebagai instrumen kepercayaan pasar. Perlindungan sosial harus menjadi bagian desain sistem pangan. Dan pangan lokal serta diversifikasi harus diposisikan sebagai sumber kekuatan, bukan sekadar pelengkap.

([Bappenas](#))

Pada akhirnya, reformasi sistem pangan nasional adalah reformasi ketahanan bangsa itu sendiri. Negara yang mampu menjaga pasokan, memperlancar distribusi, menstabilkan harga, dan memperbaiki kualitas diet masyarakat akan lebih tahan terhadap krisis global. Sebaliknya, negara yang tetap mengelola pangan secara parsial akan terus rentan terhadap guncangan dari luar dan ketidakpuasan dari dalam. Dalam dunia yang makin tidak pasti, sistem pangan yang tangguh bukan sekadar agenda pertanian. Ia adalah fondasi ekonomi, sosial, dan politik yang menentukan kemampuan sebuah bangsa untuk tetap berdiri kokoh di tengah krisis. ([World Bank](#))

MAKALAH AKADEMIK FORMAL

REFORMASI SISTEM PANGAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Abstrak

Makalah ini membahas urgensi reformasi sistem pangan nasional Indonesia dalam menghadapi krisis global yang ditandai oleh inflasi pangan, perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan logistik, dan melemahnya daya beli rumah tangga. Tulisan ini berangkat dari pandangan bahwa ketahanan pangan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menghasilkan komoditas utama, tetapi harus dimaknai sebagai kemampuan sistem pangan untuk menjamin ketersediaan, akses, pemanfaatan gizi, dan stabilitas secara berkelanjutan. World Bank menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki empat dimensi utama tersebut, sedangkan SOFI 2025 menunjukkan bahwa pada 2024 sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan, sekitar 2,3 miliar orang menghadapi kerawanan pangan moderat atau berat, dan inflasi pangan yang tinggi telah melemahkan daya beli serta akses terhadap diet sehat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. ([FAOHome](#))

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis telaah literatur dan analisis data sekunder dari lembaga resmi

internasional dan nasional, terutama FAO, World Bank, WFP, BPS, Bank Indonesia, Bappenas, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem pangan Indonesia masih ditandai oleh sejumlah kelemahan struktural: orientasi kebijakan yang masih relatif komoditas-sentris, efisiensi distribusi yang belum merata, ketegangan antara perlindungan produsen dan keterjangkauan konsumen, keterkaitan yang belum cukup kuat antara pangan dan gizi, serta tata kelola data dan koordinasi lintas-sektor yang masih perlu diperkuat. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki modal awal yang cukup baik, seperti produksi beras 2025 sebesar 34,69 juta ton, stok awal cadangan beras pemerintah yang kuat pada awal 2026, dan arah kebijakan transformasi sistem pangan yang mulai ditegaskan dalam RPJMN 2025–2029. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pangan nasional harus bergerak dari paradigma “menambah panen” menuju paradigma “membangun sistem yang tangguh”. Reformasi semacam itu perlu bertumpu pada produksi yang adaptif terhadap iklim, logistik pangan yang efisien, cadangan dan stabilisasi harga yang kredibel, diversifikasi dan keterjangkauan diet sehat, perlindungan sosial yang responsif, penguatan kelembagaan produsen, regionalisasi pangan berbasis ekoregion, serta tata kelola berbasis data. Dengan demikian, reformasi sistem pangan tidak hanya relevan bagi sektor pertanian, tetapi menjadi fondasi stabilitas ekonomi, pembangunan manusia, dan ketahanan nasional di tengah krisis global yang makin kompleks. ([Bank Indonesia](#))

Kata kunci: reformasi sistem pangan, ketahanan pangan, krisis global, inflasi pangan, perubahan iklim, Indonesia

1. Pendahuluan

Pangan adalah kebutuhan paling dasar sekaligus salah satu variabel paling sensitif dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Ketika sistem

pangan bekerja dengan baik, masyarakat relatif jarang menyadari kompleksitas di baliknya. Namun ketika harga melonjak, distribusi terganggu, atau kualitas konsumsi memburuk, dampaknya langsung terasa pada rumah tangga, inflasi, kemiskinan, dan legitimasi kebijakan publik. Karena itu, sistem pangan harus dipahami bukan semata sebagai rangkaian produksi pertanian, melainkan sebagai ekosistem yang menghubungkan lahan, air, input, transportasi, perdagangan, kesehatan, dan perlindungan sosial. World Bank mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat. Definisi ini menegaskan empat dimensi utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. ([World Bank](#))

Urgensi pembahasan ini meningkat karena krisis global dewasa ini bersifat majemuk dan saling terkait. Di satu sisi, laporan *Global Economic Prospects* dan *Food Security Update* Bank Dunia menunjukkan bahwa ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian tinggi, sementara inflasi pangan riil pada banyak negara tetap melampaui inflasi umum. Di sisi lain, SOFI 2025 menegaskan bahwa inflasi pangan yang tinggi telah secara nyata menggerus daya beli dan menghambat akses terhadap diet sehat, terutama pada kelompok miskin. Artinya, krisis global tidak hanya menekan negara melalui jalur perdagangan atau keuangan, tetapi menembus sampai ke meja makan rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, tantangan itu bersifat paradoksal. Data BPS menunjukkan bahwa produksi padi dan beras nasional meningkat cukup signifikan pada 2025. Namun pada saat yang hampir bersamaan, inflasi tahunan Februari 2026 masih tercatat 4,76 persen, dan kemiskinan September 2025 tetap 8,25 persen, dengan tingkat kemiskinan perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional memang turun menjadi 19,8 persen pada 2024, tetapi masih menunjukkan bahwa kualitas konsumsi dan ketimpangan gizi belum sepenuhnya teratasi.

Dengan demikian, persoalan pangan Indonesia bukan hanya apakah negara mampu menghasilkan lebih banyak, tetapi apakah sistem pangan mampu mengubah pasokan menjadi akses yang adil, harga yang stabil, dan hasil gizi yang lebih baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Atas dasar itu, makalah ini bertujuan membahas kebutuhan reformasi sistem pangan nasional untuk menghadapi krisis global. Fokusnya bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi pada perubahan paradigma dari pengelolaan pangan berbasis komoditas menuju pengelolaan pangan berbasis sistem. Dengan demikian, makalah ini menempatkan reformasi pangan sebagai agenda lintas-sektor yang menyentuh produksi, distribusi, stabilisasi harga, gizi, perlindungan sosial, kelembagaan, dan tata kelola.

2. Metode Penulisan

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode telaah pustaka dan analisis data sekunder. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan tulisan, yaitu menyusun sintesis akademik dan kebijakan mengenai arah reformasi sistem pangan Indonesia, bukan menguji satu hipotesis statistik tertentu. Pendekatan demikian memungkinkan integrasi antara data mutakhir, kerangka konseptual, dan implikasi kebijakan dalam satu alur argumentasi yang utuh. ([FAOHome](#))

Sumber utama yang digunakan berasal dari dokumen resmi lembaga internasional dan nasional. Dari tingkat global, makalah ini menggunakan bahan dari FAO, World Bank, dan WFP untuk menunjukkan besarnya tekanan pangan global, inflasi pangan, dan krisis ketahanan pangan. Dari tingkat nasional, makalah ini menggunakan publikasi BPS, Bank Indonesia, Bappenas, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Kesehatan RI untuk menggambarkan kondisi Indonesia, baik pada sisi produksi, harga, kemiskinan, gizi, maupun arah kebijakan reformasi. ([FAOHome](#))

Analisis dilakukan melalui empat langkah. Pertama, menjelaskan konsep ketahanan pangan dan perubahan konteks global yang menuntut reformasi. Kedua, memetakan titik lemah sistem pangan nasional Indonesia berdasarkan data produksi, distribusi, harga, kemiskinan, dan gizi. Ketiga, membaca arah kebijakan resmi pemerintah dan lembaga terkait mengenai transformasi sistem pangan. Keempat, merumuskan agenda reformasi yang lebih menyeluruh untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

3. Kerangka Konseptual: Dari Ketahanan Pangan ke Transformasi Sistem Pangan

Secara konseptual, ketahanan pangan modern tidak dapat direduksi menjadi ketersediaan bahan pangan di tingkat nasional. World Bank menekankan bahwa ketahanan pangan harus mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Kerangka ini berarti sebuah negara dapat memiliki panen yang baik, tetapi tetap menghadapi kerawanan pangan bila harga terlalu tinggi, distribusi tidak lancar, atau kualitas diet masyarakat rendah. Dengan kata lain, ketahanan pangan adalah hasil dari sistem yang bekerja, bukan hasil dari satu variabel tunggal. ([World Bank](#))

Dalam perkembangan mutakhir, konsep ketahanan pangan makin bergeser menuju transformasi sistem pangan. Pergeseran ini terlihat jelas dalam materi Bappenas mengenai transformasi sistem pangan Indonesia dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dokumen itu menegaskan visi sistem pangan Indonesia yang “sehat dan bernutrisi, inklusif, berkeadilan, resilien/tangguh, dan berkelanjutan”. Selain itu, Bappenas menempatkan regionalisasi sistem pangan berbasis ekoregion sebagai salah satu *game changer* untuk mengembangkan pangan lokal, keanekaragaman hayati, dan integrasi antara bentang darat serta perairan. Ini menunjukkan bahwa negara mulai menggeser kerangka

berpikir dari fokus sempit pada output menuju desain sistem yang lebih luas.

Pendekatan sistem ini menjadi penting karena krisis global kontemporer bersifat berlapis. Pangan kini terpengaruh bukan hanya oleh produktivitas lahan, tetapi juga oleh perubahan iklim, harga energi, biaya pupuk, suku bunga, logistik, perdagangan, dan perlindungan sosial. Karena itu, reformasi sistem pangan berarti reformasi hubungan antar-sektor. Pertanian tidak lagi bisa dibahas terpisah dari distribusi. Distribusi tidak bisa dibahas terpisah dari inflasi. Inflasi tidak bisa dibahas terpisah dari kemiskinan dan gizi. Di titik ini, transformasi sistem pangan menjadi agenda pembangunan nasional yang jauh lebih besar daripada agenda produksi komoditas.

4. Krisis Global dan Tekanan terhadap Sistem Pangan

Laporan SOFI 2025 menunjukkan bahwa dunia belum keluar dari krisis pangan. Pada 2024 sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan, dan di beberapa kawasan seperti Afrika serta Asia Barat, situasinya justru memburuk. Laporan itu juga menegaskan bahwa inflasi pangan yang tinggi telah mengurangi kemampuan rumah tangga miskin untuk mengakses diet sehat. Temuan ini penting karena menggeser fokus dari "ada atau tidak ada pangan" ke "mampu atau tidak mampu masyarakat membeli pangan sehat". ([FAOHome](#))

Bank Dunia menambahkan lapisan analisis yang penting. *Food Security Update* Desember 2025 menyebut bahwa meskipun pasar global untuk beberapa komoditas tampak relatif well supplied, biaya input masih tinggi di banyak sistem ber-margin rendah, dan inflasi pangan riil tetap melampaui inflasi umum di banyak negara. Bahkan ketika harga gandum atau beras global menurun, kerentanan rumah tangga tidak otomatis hilang karena akses terhadap pangan bergantung juga pada pendapatan, logistik, dan kondisi sosial-ekonomi lain.

Di atas itu semua, perubahan iklim memperburuk risiko. Bahan yang dirangkum dalam *Food Security Update* Desember 2025 menyebut bahwa berbagai penilaian global menunjukkan memburuknya food insecurity karena kombinasi fragility, conflict, dan climate shocks. Dalam konteks pembangunan, ini berarti sistem pangan harus dirancang bukan hanya untuk masa normal, tetapi untuk masa krisis. Sistem yang hanya efisien dalam kondisi baik tetapi runtuh saat cuaca ekstrem, konflik, atau gangguan logistik muncul, tidak bisa disebut tangguh.

WFP melalui *Global Report on Food Crises 2025* memperkuat gambaran itu dengan melaporkan lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut pada 2024. Konflik, guncangan ekonomi, dan cuaca ekstrem menjadi pendorong utama. Pelajaran bagi Indonesia sangat jelas: reformasi sistem pangan tidak boleh menunggu krisis besar hadir di dalam negeri. Ia harus dilakukan sebelum guncangan global berubah menjadi tekanan domestik yang lebih mahal untuk ditangani. ([FAOHome](#))

5. Diagnosis Sistem Pangan Indonesia

5.1 Kekuatan pada sisi produksi

Dari sisi produksi, Indonesia memiliki modal awal yang penting. BPS melaporkan bahwa pada 2025 luas panen padi mencapai sekitar 11,32 juta hektare, produksi padi dalam bentuk GKG mencapai 60,21 juta ton, dan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton. Kenaikan produksi beras mencapai 13,29 persen dibanding 2024. Angka ini menunjukkan bahwa secara agregat, fondasi pasokan domestik relatif menguat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kekuatan produksi ini memiliki arti strategis. Ia memberi ruang lebih besar bagi pembentukan stok, pengurangan impor darurat, dan penguatan kepercayaan pasar. Namun, secara kebijakan, capaian tersebut belum cukup untuk memastikan ketahanan pangan rumah tangga. Kenaikan produksi nasional adalah kondisi yang perlu, tetapi

tidak memadai bila tidak diterjemahkan ke dalam distribusi yang efisien dan harga yang terjangkau. Di sinilah agenda reformasi mulai menjadi mendesak. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5.2 Kerentanan pada sisi harga dan akses

Meski produksi menguat, tekanan harga tetap nyata. BPS mencatat bahwa pada Februari 2026 inflasi year-on-year mencapai 4,76 persen. Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa GIPS diluncurkan justru karena tantangan pengendalian inflasi pangan makin kompleks akibat risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan karakteristik komoditas pangan yang musiman. Ini berarti kebijakan produksi tidak dapat berdiri sendiri; harga yang dirasakan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan sistem pangan meredam volatilitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Akses rumah tangga juga masih menjadi titik rapuh. BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Yang lebih penting, kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh di atas perkotaan 6,60 persen. Hal ini menunjukkan paradoks yang cukup serius: sebagian produsen pangan nasional sendiri masih hidup dalam kondisi rentan. Sistem pangan yang sehat tidak dapat bertumpu pada produsen yang terus tertekan secara ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5.3 Keterhubungan yang belum kuat antara pangan dan gizi

Dimensi lain yang menegaskan perlunya reformasi adalah kualitas konsumsi. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024. Ini merupakan capaian penting, namun tetap menunjukkan bahwa masalah gizi belum selesai dan bervariasi antarkelompok sosial-ekonomi. Dengan kata lain, keberhasilan sistem pangan tidak dapat diukur hanya dari stok beras atau produksi padi. Sistem pangan harus dinilai juga dari

kemampuannya menghasilkan diet yang lebih sehat bagi ibu, anak, dan rumah tangga secara umum. ([Ministry of Health Republic of Indonesia](#))

Pandangan ini sejalan dengan temuan World Bank mengenai *Food Prices for Nutrition*. Bank Dunia menunjukkan bahwa komponen diet sehat yang paling mahal secara global adalah pangan hewani, lalu sayuran dan buah. Fakta ini sangat relevan bagi Indonesia karena reformasi sistem pangan yang hanya berfokus pada komoditas pokok akan sulit mempercepat perbaikan gizi. Oleh sebab itu, transformasi pangan perlu memasukkan diversifikasi dan keterjangkauan diet sehat sebagai sasaran inti. ([FAOHome](#))

6. Agenda Reformasi Sistem Pangan Nasional

6.1 Reformasi orientasi: dari komoditas ke sistem

Reformasi paling mendasar adalah perubahan orientasi kebijakan. Sistem pangan tidak boleh lagi dibaca sebagai sekadar urusan satu atau dua komoditas strategis. Bappenas menegaskan lima area prioritas transformasi sistem pangan Indonesia, yaitu mengakhiri kelaparan dan memperbaiki pola makan, melindungi dan memulihkan sumber daya alam, membangun bisnis inklusif, memperkuat sistem pangan lokal dan resiliensi, serta mewujudkan tata kelola yang inklusif. Agenda ini menunjukkan bahwa reformasi pangan harus menghubungkan produksi, konsumsi, lingkungan, kelembagaan ekonomi, dan tata kelola secara bersamaan.

6.2 Produksi yang tangguh terhadap iklim

Produksi tetap penting, tetapi produksinya harus berubah. Bappenas memasukkan *climate-smart agriculture*, optimalisasi lahan marginal dan pekarangan untuk resiliensi, serta promosi praktik pertanian berkelanjutan sebagai bagian dari area prioritas transformasi. Sementara itu, BI dalam GIPS juga menekankan penguatan pasokan secara struktural dan respons terhadap risiko perubahan iklim. Ini menegaskan

bahwa reformasi produksi tidak cukup berbicara tentang luas tanam, tetapi harus mencakup daya tahan sistem terhadap cuaca ekstrem dan tekanan lingkungan.

6.3 Reformasi logistik dan infrastruktur pangan

Logistik harus diperlakukan sebagai bagian dari stabilitas pangan. Dalam dokumen Bappenas, logistik dan infrastruktur pangan ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola inklusif dan prioritas transformasi sistem pangan. Ini penting karena banyak gejolak harga domestik tidak berasal dari kekurangan pasokan nasional, tetapi dari mahal atau lambatnya aliran barang antardaerah. Bagi negara kepulauan, reformasi logistik berarti reformasi keadilan akses. Ketika biaya distribusi turun, peluang menjaga harga tetap wajar tanpa merugikan produsen menjadi lebih besar.

6.4 Cadangan dan stabilisasi harga yang kredibel

Cadangan pangan publik harus diperkuat bukan hanya sebagai stok fisik, tetapi juga sebagai instrumen kepercayaan pasar. Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa pada 12 Januari 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai 3,36 juta ton, terdiri dari sekitar 3,23 juta ton CBP dan sekitar 129 ribu ton stok komersial. Bapanas juga menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Di sini terlihat bahwa cadangan yang kuat tidak berarti apa-apa bila tidak terhubung dengan distribusi dan intervensi yang presisi. ([Badan Pangan Nasional](#))

Selain itu, SPHP tetap menjadi instrumen penting. Bapanas menyatakan program SPHP beras akan terus berjalan sepanjang 2026, dengan anggaran sekitar Rp4,97 triliun untuk mendukung subsidi harga bagi total 828 ribu ton beras SPHP. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara masih memerlukan instrumen stabilisasi jangka pendek. Namun dalam kerangka reformasi, SPHP seharusnya dilihat sebagai penyangga, bukan

sebagai pengganti pembenahan struktural logistik, data, dan produktivitas. ([Badan Pangan Nasional](#))

6.5 Diversifikasi, pangan lokal, dan diet sehat

Reformasi sistem pangan harus bergerak dari logika “cukup kalori” ke logika “cukup pangan sehat”. Bappenas menempatkan bantuan pangan sehat dan bergizi, fortifikasi, pengembangan pangan lokal, promosi warisan kuliner, dan perbaikan pola makan sebagai bagian dari area prioritas transformasi. Ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk tidak terlalu terkurung pada satu komoditas. Diversifikasi pangan dan penguatan pangan lokal juga memberi keuntungan strategis: menyebar risiko, meningkatkan ketahanan wilayah, dan membuka nilai tambah ekonomi daerah.

6.6 Perlindungan sosial dan perlindungan kelompok rentan

Sistem pangan yang direformasi harus mengakui bahwa tidak semua rumah tangga memiliki daya tahan yang sama terhadap guncangan. Karena itu, perlindungan sosial harus menjadi bagian permanen dari desain sistem pangan. Bappenas menyatakan bahwa gelontoran bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan membantu konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan memungkinkan pengalihan pengeluaran ke kebutuhan pokok lain atau kegiatan produktif. Pendekatan ini penting karena rumah tangga rentan memerlukan penyangga yang cepat ketika inflasi pangan meningkat. ([Badan Pangan Nasional](#))

6.7 Tata kelola berbasis data dan regionalisasi

Reformasi pangan tanpa pembenahan tata kelola akan mudah terjebak menjadi program jangka pendek. Bappenas menempatkan *dashboard* sistem pangan, penguatan perencanaan sistem pangan nasional dan lokal, serta regionalisasi sistem pangan dalam kebijakan dan tata kelola sebagai prioritas. Dengan kata lain, keputusan pangan harus makin

berbasis data, lintas-wilayah, dan lintas-sektor. Dalam era krisis global, negara yang memiliki informasi lebih cepat dan koordinasi yang lebih baik akan lebih mampu bertindak sebelum gangguan berubah menjadi krisis.

7. Tantangan Implementasi Reformasi

Walaupun arah reformasi sudah cukup jelas, implementasinya tidak mudah. Tantangan pertama adalah fragmentasi kelembagaan. Pangan menyentuh banyak instansi, mulai dari pertanian, perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum, kesehatan, hingga pemerintah daerah. Bila koordinasi lemah, kebijakan akan cenderung parsial. Tantangan kedua adalah keterbatasan kualitas data yang terintegrasi. Produksi, stok, distribusi, harga, dan kerentanan sosial sering kali belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem keputusan yang tangkas. ([Bank Indonesia](#))

Tantangan ketiga adalah pembiayaan transformasi. Reformasi sistem pangan memerlukan investasi besar pada benih, irigasi, gudang, pendingin, logistik, digitalisasi, dan kelembagaan produsen. Tanpa dukungan pembiayaan yang kuat, reformasi akan berhenti di tingkat dokumen kebijakan. Tantangan keempat adalah resistensi terhadap perubahan paradigma. Selama keberhasilan pangan masih dinilai terutama dari tonase panen, dimensi distribusi, gizi, dan tata kelola akan mudah tersisih. Reformasi karena itu memerlukan perubahan cara ukur, bukan hanya perubahan program.

8. Kesimpulan

Reformasi sistem pangan nasional merupakan prasyarat penting bagi Indonesia untuk menghadapi krisis global yang makin kompleks. Data global menunjukkan bahwa ketidakamanan pangan masih tinggi, inflasi pangan tetap menjadi ancaman, dan guncangan iklim serta konflik memperdalam kerentanan. Data Indonesia menunjukkan bahwa produksi nasional membaik, tetapi tantangan pada sisi akses, distribusi, harga, kemiskinan, dan gizi masih kuat. Karena itu, reformasi pangan

tidak dapat dibatasi pada peningkatan output. Ia harus diarahkan pada pembentukan sistem yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

([FAOHome](#))

Inti reformasi itu adalah pergeseran paradigma: dari komoditas menuju sistem, dari reaktif menuju antisipatif, dari stok menuju keterjangkauan diet sehat, dan dari kebijakan sektoral menuju tata kelola lintas-sektor. Reformasi yang demikian akan membuat sistem pangan Indonesia tidak hanya lebih mampu menahan guncangan global, tetapi juga lebih mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kata lain, reformasi sistem pangan adalah reformasi ketahanan bangsa itu sendiri.

Glosarium

Ketahanan pangan: kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat. ([World Bank](#))

Ketersediaan pangan: dimensi ketahanan pangan yang berkaitan dengan tersedianya pangan secara fisik melalui produksi, impor, dan cadangan. ([World Bank](#))

Akses pangan: kemampuan individu atau rumah tangga memperoleh pangan secara ekonomi dan geografis. ([World Bank](#))

Pemanfaatan pangan: penggunaan pangan yang berkaitan dengan mutu gizi, keamanan pangan, kesehatan, dan pola konsumsi. ([World Bank](#))

Stabilitas pangan: keberlanjutan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi guncangan. ([World Bank](#))

Transformasi sistem pangan: perubahan menyeluruh pada cara pangan diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, dan dikelola agar menjadi lebih sehat, inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.

Regionalisasi sistem pangan: pendekatan pengembangan pangan berbasis ekoregion untuk memperkuat pangan lokal, keanekaragaman hayati, dan resiliensi wilayah.

CBP (Cadangan Beras Pemerintah): stok beras pemerintah yang dikelola untuk menjaga ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga. ([Badan Pangan Nasional](#))

SPHP: program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang digunakan pemerintah untuk menekan gejolak harga beras di pasar. ([Badan Pangan Nasional](#))

GPIPS: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, strategi Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas harga dan pasokan pangan secara terintegrasi dan berkelanjutan. ([Bank Indonesia](#))

Stunting: kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lingkungan yang tidak mendukung. ([Ministry of Health Republic of Indonesia](#))

Diet sehat: pola konsumsi yang cukup, beragam, aman, dan bergizi, yang aksesnya sangat dipengaruhi oleh daya beli dan harga pangan. ([FAOHome](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pangan Nasional. (2026, January 12). *Swasembada beras tercapai, Bapanas pastikan stok awal 2026 aman dan harga terkendali.* ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2026, February 26). *Bapanas: Harga pangan pokok strategis cenderung mulai stabil dan menurun.* ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG).* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 11). *Fokuskan ketahanan pangan, GPIPS jadi strategi baru jaga inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bappenas. (2025, January 30). *Transformasi sistem pangan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition.* ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *SOFI 2025: FAO calls for urgent, coordinated and inclusive action to end global hunger.* ([FAOHome](#))

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, May 26). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%.* ([Ministry of Health Republic of Indonesia](#))

World Bank. (2025). *Food Security Update.*

World Bank. (2025). *Food security: What is food security? There are four dimensions.* ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *Food prices for nutrition: DataHub.* ([World Bank](#))

World Food Programme. (2025). *Global Report on Food Crises 2025.* ([FAOHome](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 11 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69129df8-12fc-8322-99e8-d3c683bbf9c4>